

**IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
DI KELURAHAN DADAPSARI KECAMATAN SEMARANG UTARA
BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NO. 77 TAHUN 2017**

Heberina Trinatis Tampubolon, Hartuti Purnaweni
**Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Fax (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Indonesia menduduki peringkat 4 dunia dengan jumlah penduduk terbanyak setelah Cina, India dan Amerika Serikat dengan laju pertumbuhan penduduk 3 juta sampai 4 juta jiwa per tahun. Pertumbuhan penduduk yang tinggi salah satunya terjadi di Kota Semarang dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1.65% yang sekaligus menjadi laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Kota Semarang memiliki jumlah penduduk usia produktif yang tinggi mencapai 74%. Untuk mengontrol laju pertumbuhan penduduk dan mendekatkan program kependudukan maka dibentuk kampung KB di RW IV Dadapsari. Kelurahan Dadapsari memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 1% dengan 66% penduduk berusia produktif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program kampung KB Dadapsari berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 77 Tahun 2017 yaitu mengenai pembentukan dan pembinaan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian yaitu pembentukan Kampung KB Dadapsari dilakukan sesuai dengan kriteria utama, wilayah dan umum. Kriteria utama adalah partisipasi KB yang rendah yaitu 52% dan terjadi pernikahan dini. Kriteria wilayah yaitu kumuh, padat penduduk, dekat bantaran rel kereta api dan sungai. Kriteria khusus yaitu mayoritas penduduk berpendapatan dan berpendidikan rendah. Kegiatan kependudukan seperti BKB, BKL, BKR dan pembinaan kader belum dilakukan maksimal. Perencanaan kegiatan melibatkan masyarakat dan mengacu pada kebutuhan masyarakat. Kegiatan evaluasi tidak rutin dilaksanakan dan terakhir dilakukan pada tahun 2017. Partisipasi masyarakat terhadap program masih kurang. Saran yang dapat diberikan yaitu adanya reward untuk kader, inovasi kegiatan di Kampung KB Dadapsari dan pembinaan lebih DPPKB kepada masyarakat.

Kata kunci : kependudukan, implementasi, kampung KB, pembinaan.

**THE IMPLEMENTATION OF FAMILY PLANNING VILLAGE
PROGRAM IN DADAPSARI VILLAGE, NORTH SEMARANG SUB-
DISTRICT BASED ON THE CENTRAL JAVA GOVERNOR
REGULATION NUMBER 77 YEAR 2017**

Indonesia is ranked 4th in the world as the largest population after China, India and the United States with a population growth rate of 3 million to 4 million people per year. One of the cities that have high population growth is Semarang with the population growth rate of 1.65% in which it is also claimed as the highest rate of population growth in Central Java province. Besides, Semarang has a number of productive ages reaching 74%. To manage the rate of population growth in order to get closer to the family planning program, it is established a family planning program called KB village in RW IV Dadapsari. Dadapsari village has a population growth rate of 1% with 66% population of productive age. The purpose of this study is to determine the implementation of the Dadapsari KB village program based on the Central Java Governor Regulation Numb. 77 of 2017 which is about the establishment and coaching. This research is a descriptive qualitative research. The result of the study shows that Dadapsari KB Village has been established in accordance with several criteria called main criteria, regional criteria and specific criteria. The main criteria include families with low rate of family planning participation which are 52% population of early age marriages. The regional criteria include families who live in slums, densely populated, near the railroad and river banks. The specific criteria involve the population with low income and low level of education. Population activities such as BKB, BKL, BKR and cadre coaching have not been carried out optimally. Activities planning should involve the community and refers to community needs. Evaluation activities are not routinely carried out and lastly conducted in 2017. Moreover, community participation in the program is still lack. Some suggestions that can be done are giving rewards for the cadres, creating activity innovation in the Dadapsari Family Planning village and providing more socialization from the Population and Family Planning Control Agency (DPPKB) to the community.

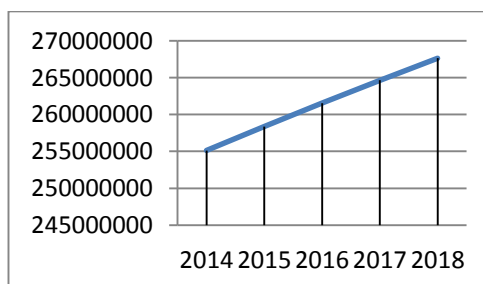
Keywords: population, implementation, family planning, development.

PENDAHULUAN

Kondisi kependudukan di Indonesia saat ini masih menjadi *concern* pemerintah untuk dapat menciptakan kondisi kependudukan yang lebih baik dan mencari jalan keluar dan usaha untuk dapat mengatasi permasalahan kependudukan yang masing sering terjadi.

Jumlah penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sebesar 3 juta bahkan hampir mendekati angka 4 juta per tahun. Padahal target BKKBN dalam Surapaty (2016) menargetkan jumlah ideal atau target peningkatan jumlah penduduk di Indonesia setiap tahunnya yaitu 1 juta sampai 2 juta atau tidak lebih dari 2 juta jiwa per tahun. Berikut adalah data peningkatan jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2014 – Tahun 2018 :

Tabel 1.1
Peningkatan Jumlah Penduduk di Indonesia Tahun 2014 – Tahun 2018



Sumber :World Bank, 2019. (Diolah)

Penduduk di Indonesia tersebar di provinsi – provinsi besar di Indonesia salah satunya ialah Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah memiliki 35 kabupaten/kota

dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 0.71% pada tahun 2017 (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018).

Kota Semarang sebagai ibukota dari Provinsi Jawa Tengah memiliki laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Jawa Tengah dengan angka 1.65% pada tahun 2018 (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018). Selain memiliki laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, Kota Semarang memiliki penduduk berusia produktif (15 - 65 tahun) mencapai 74% dari jumlah penduduk yang ada yaitu 1.302.887 dari 1.757.686 jiwa penduduk.

Pertumbuhan penduduk dan tingginya usia produktif yang dimiliki Kota Semarang harus diseimbangkan dengan peningkatan kesejahteraan pada masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya ialah kependudukan dan wilayah tempat tinggal/lingkungan. Kota Semarang memiliki 62 kelurahan yang berwilayah kumuh dari 177 kelurahan yang ada yang diantaranya adalah Kelurahan Dadapsari.

Kelurahan Dadapsari memiliki luas 81.243 Ha dengan 27.24 Ha diantaranya merupakan wilayah kumuh. Laju pertumbuhan penduduk di Kelurahan Dadapsari mencapai 1% (2017) dengan kepadataan penduduk 18.341,85/km. (Data Kelurahan Dadapsari 2018)

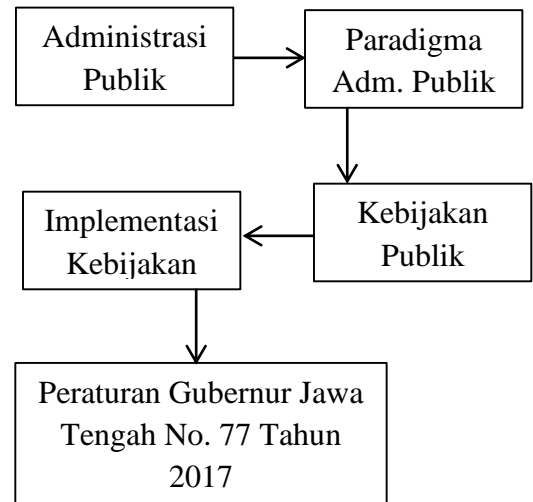
Kelurahan Dadapsari sebesar 66% masyarakatnya berusia

produktif yaitu sejumlah 5688 jiwa dari total 8617 jiwa dan jumlah pasangan usia subur/PUS sebesar 3010 PUS. Akan tetapi sampai tahun 2018 terdapat 910 PUS di Kelurahan Dadapsari yang tidak mengikuti program KB.

Berdasarkan permasalahan kependudukan, program KB yang belum menyeluruh diikuti masyarakat dan lingkungan baik di Indonesia dan juga dalam hal ini Kelurahan Dadapsari, maka Presiden Joko Widodo bersama Kepala BKKBN pada tahun 2016 membentuk kampung KB. Menurut BKKBN (2016) kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.

Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian mengenai implementasi Kampung KB di Kelurahan Dadapsari yang sekaligus kampung KB pertama yang dibentuk di Provinsi Jawa Tengah dan juga Kota Semarang pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 77 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Provinsi Jawa Tengah. Tujuan penelitian adalah menganalisis implementasi program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kelurahan Dadapsari Kecamatan Semarang Utara berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 77 Tahun 2017.

Kajian Teori



Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 77 Tahun 2017

Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 77 Tahun 2017 tentang pengembangan kampung keluarga berencana di Provinsi Jawa Tengah disusun salah satunya berisikan pembagian tugas pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten/kota tentang pengembangan kampung KB.

Pemerintah kabupaten/kota khususnya dalam penelitian kali ini Pemerintah Kota Semarang bertanggungjawab atas pembentukan dan pembinaan kampung KB di Kota Semarang.

Pasal 4 ayat 2, pembentukan Kampung KB di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah menjadi tanggung jawab dan tugas dari pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, pembentukan kampung KB di Dadapsari dibentuk atas tanggungjawab dari Pemerintah Kota Semarang khususnya Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Semarang.

Pembentukan kampung KB yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang harus berdasarkan kriteria yang diatur dalam pasal 4 ayat 3 yaitu :

a. Kriteria Utama

- Jumlah Pra-KS/KS-1 dan jumlah perkawinan usia dini di atas rata-rata tingkat desa/kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi;
- Jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa/kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi.

b. Kriteria Wilayah

Pembentukan kampung KB dapat dilaksanakan apabila mencakup kriteria wilayah sebagai berikut: kumuh / kawasan miskin, tertinggal / terpencil/ perbatasan, pesisir/nelayan, padat penduduk, daerah aliran sungai, bantaran rel kereta api, kawasan industri dan/atau kawasan wisata.

c. Kriteria Khusus

Meliputi : kriteria data, kriteria pendidikan, kriteria program KB, kriteria program pembangunan keluarga, dan/atau kriteria program pembangunan sektor terkait.

Pemerintah Kota Semarang juga bertanggungjawab atas pembinaan kampung KB. Kegiatan pembinaan dijelaskan dalam pasal 7 ayat 1 yaitu dengan membentuk Tim Koordinasi Kampung KB yang akan melaksanakan tugas seperti

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kampung KB.

Berdasarkan uraian tersebut, dalam penelitian ini menganalisis implementasi kampung KB Dadapsari yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang terhadap kesesuaiannya dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 77 Tahun 2017.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini penentuan informan dilakukan secara purposive, dengan kriteria pihak-pihak yang mengetahui dan terlibat langsung dalam pelaksanaan program Kampung KB Dadapsari yaitu DPPKB Kota Semarang, Kelurahan Dadapsari dan masyarakat Dadapsari.

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang berupa kata-kata, maupun gambar yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu pembentukan kampung KB Dadapsari dan pembinaan kampung KB Dadapsari.

Pembentukan Kampung KB

Kampung KB Dadapsari dibentuk pada April 2016 yang diresmikan oleh Hevearita Gunaryanti Rahayu Wakil Walikota Semarang yang bertempat di RW IV Kelurahan Dadapsari. Pembentukan kampung

KB Dadapsari yaitu berdasarkan kriteria sebagai berikut :

Kriteria Utama

Pembentukan kampung KB Dadapsari berdasarkan kriteria utama yaitu jumlah peserta KB aktif di RW IV Dadapsari masih berada di bawah rata-rata. Sebelum pembentukan dan pelaksanaan kegiatan, tahun 2016 rata-rata PUS yang menggunakan KB di RW IV Dadapsari yaitu 52%, angka tersebut masih jauh dari target BKKBN (2017) yang menyatakan bahwa sasaran peningkatan pemakaian alat/obat kontrasepsi pada PUS yaitu 66%. Berikut adalah tabel PUS di RW IV Dadapsari yang menunjukkan pengguna KB sesudah dan sebelum pembentukan kampung KB Dadapsari pada tahun pembentukan 2016 :

Tabel 1.2
Keikutsertaan Dalam Ber-KB
Sebelum dan Sesudah Pembentukan
Kampung KB Dadapsari Tahun 2016

KB	B	A
IUD	3	6
MOP	-	-
MOW	11	14
IMPLAN	3	1
SUNTIK	25	33
PIL	4	1
KONDOM	1	1
Jumlah	47	56
%	51.08	51.85
Tidak KB	B	A
Hamil	8	5
Ingin Anak	17	19
Ingin Anak Tunda	9	10
Tidak Ingin Anak	11	18
Jumlah	45	52
%	48.92	41.85

Ket : B = before A= after
Sumber : Data Lapangan

Dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat peningkatan jumlah pengguna KB di RW IV Dadapsari. Namun jumlah tersebut masih kurang dari target BKKBN yang menargetkan 66% PUS dalam suatu wilayah terdaftar dalam program KB.

Selain jumlah pengguna KB yang masih rendah, kriteria utama dalam pembentukan kampung KB di Dadapsari didasari oleh pernikahan dini. Kasus pernikahan dini masih sering terjadi di Indonesia, pada tahun 2015 kasus pernikahan dini di Indonesia mencapai 22.8% dan meningkat menjadi 25,7% pada tahun 2017 (Kementerian Agama,2017). Sama halnya terjadi di Kelurahan Dadapsari, pada tahun 2016 tercatat 4 kasus pernikahan dini yang disebabkan oleh MBA (*Married by Acccident*) dan keadaan membaik setelah dibentuk sebagai kampung KB. Pada tahun 2017 terjadi penurunan jumlah kasus pernikahan dini yaitu 1 kasus pernikahan dini dan tahun 2018 terjadi 2 kasus pernikahan dini.

Pernikahan dini dengan usia dibawah 16 tahun untuk perempuan dan dibawah 19 tahun untuk laki-laki dapat dilakukan dengan melakukan sidang dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama (PA). Sidang dispensasi dapat dilakukan apabila pernikahan harus segera dilaksanakan karena faktor tertentu yang tidak dapat ditunda.

Kriteria Wilayah

Kriteria wilayah kampung KB di bentuk di Dadapsari yaitu mayoritas masyarakatnya miskin dan bekerja sebagai buruh dengan rata-rata pendapatan di bawah UMR Kota Semarang Rp. 2.300.000,00 daerah pesisir yaitu dekat dengan kali / sungai, dekat bantaran rel kereta api, wilayah padat penduduk dengan 18.341.85 per KM dan keadaan lingkungan sekitar yang kumuh. Berdasarkan SK Wali Kota Semarang No. 050/801/2014 terdapat 62 Kelurahan dari 177 kelurahan di Kota Semarang yang masuk dalam daerah penanganan wilayah kumuh, salah satunya adalah Kelurahan Dadapsari dengan luas daerah kumuh 27,24 Ha.

Beberapa keadaan rumah dan luas rumah yang dimiliki warga di RW IV Dadapsari tidak sesuai dengan jumlah orang yang tinggal di dalamnya. Sebagian warga juga tidak memiliki dapur dan tempat cuci khusus karena keadaan rumah yang sempit dan tidak ada ruang lebih sehingga untuk mencuci dan memasak dilakukan di perkarangan depan rumah.

Kriteria Khusus

Berdasarkan kriteria khusus yaitu belum ada kegiatan pembinaan keluarga yang dilakukan di Kelurahan Dadapsari, serta mayoritas keluarga berpenghasilan rendah dengan penghasilan di bawah UMR Kota Semarang atau setara dengan Rp 1.500.000,00 sampai Rp 2.000.000,00. Indikator lain yang mendukung kriteria khusus pembentukan kampung KB Dadapsari yaitu tingkat pendidikan penduduk lokal yang rendah yaitu

rata-rata pendidikan masyarakat yang berusia 25-45 tahun berpendidikan SMA, sementara usia 50 tahun ke atas memiliki rata-rata pendidikan SD/SMP.

Pembinaan Kampung KB

Kegiatan pembinaan kampung KB di Dadapsari sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 77 Tahun 2017 terbagi menjadi pembentukan tim koordinasi pengembangan kampung KB, kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Pembentukan Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kota Semarang

Pelaksana pengembangan kampung KB di Kota Semarang ialah Tim Koordinasi Pengembangan Kampung KB Kota Semarang yang dibentuk berdasarkan SK Walikota Semarang No. 467/1164 Tahun 2018. Namun dalam pelaksanaan kampung KB Dadapsari belum banyak peran yang dilakukan oleh anggota dari tim koordinasi tersebut karena tim tersebut baru dibentuk pada tahun 2018 sedangkan pelaksanaan kampung KB Dadapsari dimulai pada April 2016.

Perencanaan

Perencanaan yang dilakukan di dalam pengembangan dan pembinaan Kampung KB Dadapsari dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang yang didukung oleh kecamatan dan kelurahan setempat serta melibatkan masyarakat.

Masyarakat Dadapsari diikutsertakan dalam kegiatan perencanaan karena program /

kegiatan yang dibuat akan dijalankan oleh masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan/ permasalahan masyarakat serta tujuan yang hendak dicapai. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Agustin (2016) keberhasilan suatu program pembangunan bukan hanya berdasar pada kemampuan pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam menjalankan program pembangunan.

Kegiatan perencanaan juga dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar dengan memperhatikan wilayah tempat tinggal warga sekitar.

Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kampung KB Dadapsari dilakukan oleh DPPKB Kota Semarang, puskesmas Bandarharjo dan kader. Kader merupakan masyarakat yang dipilih dan mampu untuk membina masyarakat lain diberbagai kegiatan yang dilaksanakan, namun kader yang dimiliki kampung KB Dadapsari masing kurang dari segi kuantitas dan kualitas. Dalam kampung KB Dadapsari terdapat berbagai kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya menghadirkan program kependudukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat/kesejahteraan guna menciptakan suasana harmonis dalam berkeluarga. Kim dan Pierce (2011) sebagian besar masyarakat masih kurang akan pengetahuan dan informasi mengenai sistem kesejahteraan sehingga akhirnya membuat keputusan yang salah dan mengakibatkan konflik dalam keluarga. Berikut adalah kegiatan

yang dilaksanakan dalam kampung KB :

1) Bina Keluarga Balita (BKB)

Sasaran dalam kegiatan BKB yaitu keluarga yang mempunyai balita. BKB di Kampung KB Dadapsari bernama BKB Ceria. Kegiatan ini ditujukan sebagai upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu di RW IV Dadapsri yang mempunyai balita dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, kesehatan, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota keluarga lainnya dengan anak balita. Kegiatan yang dilakukan yaitu posyandu balita yang rutin dilakukan setiap bulan pada tanggal 13.

Kegiatan posyandu yaitu berupa pemberian imunisasi, vitamin, makanan tambahan gizi seimbang gratis untuk balita, pendidikan untuk anak seperti cara mencuci tangan yang baik dan benar dan kegiatan bermain bersama yang dapat meningkatkan kerja dan perkembangan otak balita serta memberi informasi kepada orang tua terutama ibu cara mendidik anak yang baik dan benar. Selain itu, juga dilakukan kegiatan edukasi kepada Ibu seperti edukasi dan memberitahuan mengenai manfaat pemberian ASI eksklusif kepada balita. Kegiatan edukasi ASI ini perlu dilakukan untuk memberikan pengetahuan baru kepada Ibu karena berdasarkan penelitian Soraya (2014) masih banyak Ibu yang tidak mengetahui dengan tepat tujuan adanya pemberian ASI eksklusif

kepada bayi dan pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif belum sepenuhnya tercapai.

2) Bina Keluarga Remaja (BKR)

BKR di Kampung KB Dadapsari bernama BKR Budi Luhur, sasaran dari BKR Budi Luhur yaitu orang tua atau pengasuh yang memiliki remaja yang berusia 10-24 tahun.

Kegiatan BKR yang dilakukan di Dadapsari yaitu pembinaan dan pembelajaran kepada orang tua tentang solusi dari kenakalan remaja yang dapat digunakan sebagai arah dalam mendidik anak remaja, setelah itu orang tua dapat melanjutkan informasi untuk anak remajanya.

Orang tua remaja juga penting untuk diberikan motivasi dan pembelajaran agar semakin semangat dalam mendukung anak-anaknya bersekolah dan peduli terhadap masa depan anak termasuk untuk mencegah pernikahan dini. Rumekti (2016) memberikan motivasi kepada orang tua untuk melanjutkan pendidikan anak ke yang lebih tinggi paling tidak sampai lulus SMA/MA dengan begitu anak-anak yang ingin melakukan pernikahan sudah mencukupi umur dan sesuai dengan undang-undang perkawinan.

Kegiatan juga langsung ditujukan kepada remaja yaitu dengan sosialisasi dan pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan seperti sosialisasi mengenai informasi dampak/akibat pernikahan dini dan undang-undang yang mengaturnya. Pernikahan dini dapat dicegah dengan memberikan motivasi / dorongan terhadap masa depan anak

dan pembelajaran kepada anak. Motivasi yang diberikan kepada anak akan membuat seorang anak lebih memilih sekolah dibanding dengan menikah diusia muda.

Kegiatan lain yang dilakukan yaitu dengan memberikan pembelajaran dan pemahaman tentang menjaga kesehatan reproduksi remaja. Selain itu terdapat PIK (Pusat Informasi Konseling) yang melibatkan remaja dan teman sebaya untuk dapat saling bercerita dan memberikan solusi satu sama lain.

3) Bina Keluarga Lansia (BKL)

BKL di Kampung KB Dadapsari bernama BKL Sejahtera. Didalam BKL Sejahtera terdapat anggota sejumlah 32 KK, belum semua keluarga yang mempunyai lansia ikut dalam kegiatan BKL. Hal ini dikarenakan kesibukan dari anggota keluarga lain yang tidak dapat menemani lansia tersebut dalam mengikuti kegiatan.

Kegiatan dalam BKL Sejahtera yaitu senam lansia, dan pelayanan kesehatan gratis bagi lansia. Kegiatan ini ditujukan untuk memperhatikan kesehatan lansia agar tetap bugar walaupun memasuki usia tua. Cahyani (2014) kegiatan BKL dapat menumbuhkan motivasi yang ditunjukkan kepada lansia dengan merasakan badan menjadi lebih sehat dan kuat, mandiri, produktif serta bermanfaat bagi lingkungan sehingga terwujud keluarga lansia yang tangguh di masyarakat.

4. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ)

TPQ merupakan kegiatan keagamaan yang rutin dilakukan di lingkungan Dadapsari. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi perkembangan rohani keluarga di Kampung KB Dadapsari. Sasaran dari kegiatan ini yaitu anak-anak dan juga semua kalangan masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan yaitu antara lain belajar ngaji gratis untuk anak-anak, pengajian untuk ibu-ibu dan kegiatan pembacaan doa yang diagendakan rutin di rumah warga atau balai pertemuan di RW IV Dadapsari.

Kegiatan keagamaan dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang tentram dan damai bagi masyarakat dan juga keluarga. Kegiatan keagamaan juga sebagai pedoman bagi keluarga untuk menjalankan peran masing-masing dalam keluarga untuk menciptakan keluarga yang harmonis.

5. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

UPPKS yaitu kegiatan yang memberi peluang bagi setiap keluarga untuk belajar berusaha, mengelola modal, bermitra usaha, berorganisasi, mempelajari teknis produksi dan belajar menganalisis pasar.

Terdapat program pinjaman dana kepada masyarakat Dadapsari yang mempunyai usaha atau yang ingin mulai untuk membuka usaha dengan cara pengembalian dana angsuran. Terdapat 2 jenis pinjaman dana usaha yaitu berjumlah Rp 500.000,00 dengan syarat fotokopi KTP dan Rp 2.000.000,00 dengan syarat pengajuan proposal rencana

bisnis yang akan dilakukan ke pengurus UPPKS. Namun program ini tidak tepat sasaran, terdapat beberapa masyarakat yang diketahui menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan sehari-hari bukan untuk membuka usaha bisnis.

Kegiatan lain yang dilakukan di UPPKS Kampung KB Dadapsari yaitu kegiatan sosialisasi pengelolaan keuangan keluarga, bimbingan dan pembinaan yang dilakukan oleh petugas lapangan KB untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

6. Program KB

Pelayanan KB / alat dan obat kontrasepsi diberikan gratis kepada pasangan usia subur / PUS di kampung KB Dadapsari.

Tabel 4.1
Jumlah Peserta KB Aktif
Kampung KB Dadapsari

No.	Tahun	Jumlah PUS	PUS Ikut KB	%
1.	2016	108	56	52%
2.	2017	87	48	55%

Sumber : Data Lapangan, 2019.

Setelah adanya pembentukan kampung KB, peserta aktif KB di Kampung KB Dadapsari mengalami peningkatan.

Terdapat kegiatan lain yang dilakukan yaitu penyuluhan tentang program KB dan pentingnya KB oleh kader PKB (Penyuluh Keluarga Berencana) yang dilakukan disela-sela kegiatan arisan ibu-ibu dan kegiatan PKK. Olaitan (2011), setiap

pasangan harus diberikan informasi yang baik mengenai pentingnya KB hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesehatan reproduksi pada mereka, peningkatan status ekonomi, mengurangi kematian ibu, morbiditas dan mengurangi kehamilan yang tidak diinginkan.

Evaluasi

Kegiatan evaluasi kampung KB yaitu mencakup pertemuan rutin kelompok kerja (pokja) terhadap pelaksanaan rencana kerja dan capaian program, *monev* berjenjang dan terpadu antar komponen terlibat, dan analisis data hasil laporan Kampung KB.

Evaluasi menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah program. Hal ini menjadi penting untuk dilakukan karena evaluasi yang baik dapat menghasilkan informasi dari kegiatan yang telah dilakukan dan dapat digunakan sebagai bahan dasar pengambilan keputusan maupun kebijakan untuk selanjutnya.

Kegiatan evaluasi dilakukan oleh DPPKB Kota Semarang melalui data dan informasi yang diterima dari kader dan masyarakat serta keadaan yang diamati langsung di lingkungan Kampung KB Dadapsari. Akan tetapi dari pengamatan lapangan yang dilakukan kegiatan evaluasi baru dilakukan sampai tahun 2017, untuk tahun 2018 belum ditemukan data-data evaluasi yang dapat ditunjukkan tentang pelaksanaan kampung KB.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pembentukan kampung KB Dadapsari sudah tepat sasaran yaitu bahwa kriteria utama, kriteria wilayah dan kriteria khusus pembentukan kampung KB Dadapsari sudah sesuai berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 77 Tahun 2017.
- 2) Kegiatan pembinaan kampung KB Dadapsari yaitu perencanaan sudah berjalan baik dengan melibatkan masyarakat secara langsung untuk dapat memenuhi kebutuhan dan mengatasi permasalahan serta mencapai tujuan. Kegiatan yang dilaksanakan di kampung KB Dadapsari yaitu BKB, BKR, BKL, UPPKS, TPQ, pelayanan KB dan kerja bakti. Kegiatan yang dilaksanakan belum maksimal dan perlu adanya partisipasi masyarakat agar manfaat kampung KB dapat dirasakan. Untuk kegiatan evaluasi belum berjalan dengan lancar karena evaluasi berhenti sampai tahun 2017, belum ada data yang dapat menunjukkan telah dilaksanakan evaluasi untuk tahun 2018.

Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pembinaan dan memberikan motivasi dan *reward* kepada kader yang berhasil menjalankan kewajibannya dengan baik.

- 2) Inovasi kegiatan agar menarik partisipasi masyarakat yang lebih baik.
- 3) Meningkatkan peran langsung DPPKB kepada pelaksanaan kampung KB Dadapsari.

Kim Jangmin, Pierce A, et all. 2016. *Improving Child Welfare Services With Family Team Meetings*. Journal Of Econpapers. Volume 70 Pages 261-268.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Tengah. 2018. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah : Badan Pusat Statistik.

Agustin, Merry et al. 2016. "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbang (Studi Kasus Pada Pembangunan Japordes Desa Tunggungjangkir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan). Dalam Publika vol.4, no 1.

Cahyani Cacah. 2014. Manfaat Penyuluhan Bina Keluarga Lansia Bagi Peserta Posbindu Pada Kehidupan Sehari - Hari. Skripsi Repository Universitas Pendidikan Indonesia.

Kementerian Agama. 2017. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017. Kabupaten Magelang: Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari.

Olaitan. 2011. Factors Influencing The Choice Of Family Planning Among Couples In Southwest Nigeria. International Journal Of Medicine And Medical Sciences, 3(7): 227-232

Rumekti Martyan Mita, V. Indah Sri. 2016. Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu. Jurnal Pendidikan Sosiologi 1-16

Surapaty Chandra. 26 September 2016. Laju Pertumbuhan Penduduk 4 Juta Pertahun. Dalam: <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/laju-pertumbuhan-penduduk-4-juta-per-tahun>, diakses pada 28 Desember 2018

World Population Review. 2019. Total Population by Country 2019. <http://worldpopulationreview.com/countries/>, diakses pada 07 Mei 2019